

PJ WALI KOTA PEKANBARU IKUTI RAKOR PENGENDALIAN INFLASI PEKAN KEEMPAT AGUSTUS



Sumber gambar:

https://www.pekanbaru.go.id/berkas_file/news/28082024/45454-news-pj-wali-kota-pekanba.jpeg

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dan High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah pada 26 Agustus 2024. Rakor ini membahas evaluasi inflasi dan indeks perkembangan harga pada pekan keempat Agustus.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Ingot Ahmas Hutasuhut, Rabu (28/8/2024), mengungkapkan, rakor pengendalian inflasi itu diikuti Pj wali kota secara virtual di Jakarta. Karena, Pj wali kota sudah akan dievaluasi oleh mendagri atas kinerja sebagai Pj wali kota. Sedangkan di Pekanbaru, rakor pengendalian inflasi ini diikuti oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setdako Pekanbaru Mahyuddin.

Deputi Bidang Statistik Distribusi Dan Jasa Pudji Ismartini menyampaikan terkait tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga pada pekan keempat Agustus. Perkembangan harga cabai rawit naik sebesar 10,40 persen dibandingkan Juli 2024. Jumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga cabai rawit sampai dengan pekan

keempat Agustus berkurang dibanding pekan sebelumnya. Perkembangan harga beras masih mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen dibandingkan bulan Juli.

Jumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga beras sama dibandingkan pekan sebelumnya. Perkembangan harga minyak goreng naik sebesar 0,33 persen dibandingkan Juli lalu. Jumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga minyak goreng bertambah dibanding minggu sebelumnya.

Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa berdasarkan Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, maka diimbau agar produsen dapat menyesuaikan jenis DMO dan jenis kemasan Minyakita serta menjaga kontinuitas pasokan minyak goreng rakyat. Diimbau juga agar produsen dapat mensosialisasikan kebijakan minyak goreng rakyat pada jaringan distribusi.

Terakhir, produsen diimbau agar dapat berkoordinasi dengan pemerintah dalam mendistribusikan minyak goreng secara tepat sasaran. Diharapkan kepada pemerintah daerah (Dinas Perdagangan) di daerah meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha termasuk perdagangan.

"Karena, masih banyak pedagang pasar yang belum mengetahui bahwa HET Minyakita telah berubah dan minyak goreng curah tidak lagi diatur HET-nya," ucapnya. Menindaklanjuti kenaikan tren di sejumlah kabupaten sehubungan dengan minyak goreng ganti kemasan dan ganti harga, Plt Sekjen Kemendagri Komjen Tomsy Tohir menyampaikan bahwa diberikan toleransi 90 hari terhitung 14 Agustus. Sehingga, keraguan atau kekhawatiran tidak ada untuk menjual dengan kemasan yang lama.

Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan Andriko Noto Susanto menyampaikan bahwa terkait aksi dan strategi badan pangan nasional mengendalikn inflasi pangan nasional. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

"Perpres ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk menuju cita-cita mandiri dan daulat pangan serta menjadi kekuatan sumber daya lokal yang dimiliki. Maka dimohon dukungan kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk dipercepat Perpres ini yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait untuk melakukan strategi nasional dalam rangka percepatan penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal," ujarnya.

Kedeputian III Bidang Perekonomian Kantor Staf presiden Edy Priyono membahas terkait laporan hasil pemantauan harga pangan strategis. Perkembangan harga tingkat nasional, bawang putih (tidak aman). Disarankan agar penerbitan PI dan realisasi

impur perlu dipercepat. Bapanas dan Kemendag siapkan sanksi bagi importir yang wanprestasi.

Perkembangan harga tingkat nasional bawang merah (tidak aman). Disarankan agar daerah penghasil perlu mengambil langkah untuk membantu petani, misalnya memanfaatkan bantuan pusat untuk membangun gudang penyimpanan. Perkembangan harga tingkat nasional cabe rawit (waspada). Disarankan agar daerah yang harga cabai tinggi dapat melakukan Kerja sama Antar Daerah (KAD) dengan cara membeli dari daerah lain yang harganya murah.

Direktur Pembenihan Hortikultura Kementerian Pertanian Inti Pertiwi Nashwari menyampaikan terkait pengamanan pasukan produksi komoditas pertanian. Dikarenakan kenaikan beras di beberapa titik, Perum Bulog kemudian melakukan berbagai kegiatan bersama dan saling bersinergi dengan pemerintah daerah dalam stabilisasi harga di daerah perbatasan. Salah satu contoh kegiatannya yaitu kios penyeimbang Puan Berseri (Pemasaran Usaha Langan Bersama Secara Lestari) di Kota Pekanbaru, yang merupakan gagasan inovasi dalam rangka menekan inflasi di suatu wilayah melalui kerja sama dengan Pemkab atau Pemko dan TPID serta menjadi alat sosialisasi terkait SPHP.

Direktur Pertimbangan Hukum Sila Pulungan menyampaikan terkait pendampingan hukum pengendalian inflasi daerah tahun 2024. Langkah-langkah pengendalian inflasi yang dapat dilakukan antara lain melakukan pemantauan harga stok, melaksanakan rapat TPID, menjaga pasokan bahan pokok, gerakan menanam, melaksanakan pasar murah, melaksanakan sidang, berkoordinasi dengan daerah penghasil, merealisasikan Bantuan Tidak Terduga (BTT), dan melakukan bansos.

Diketahui komoditas pangan yang berkontribusi dalam inflasi adalah beras dan cabai rawit. Sehingga, hal ini perlu diantisipasi dengan bekerja sama bersama semua pihak, saling bersinergi antara Kementerian dan Lembaga pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk pengendalian inflasi guna memitigasi potensi lonjakan inflasi.

Guna memitigasi potensi lonjakan inflasi ini maka dibuat program dan kebijakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengendalian inflasi. Program dan kebijakan yang dibuat agar tidak bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintah yang baik, terutama asas kecermatan dan asas kehati-hatian.

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Helfi Assegaf selaku Kasatgas Pangan Polri menyampaikan bahwa terdapat beberapa sentra produksi cabai rawit yang mengalami gagal panen. Akibat kekurangan air dan beberapa sentra produksi cabai telah memasuki masa akhir panen.

Harga rata-rata nasional Minyakita masih di atas HET sejak tahun 2023. Terakhir, terdapat beberapa wilayah yang mengalami gagal panen dikarenakan cuaca yang ekstrem dan hama.

Beberapa hal perlu direkomendasikan. Pemerintah dan Polri melakukan monitoring terkait sentral produksi yang surplus untuk disalurkan kepada sentral produksi yang defisit serta melakukan pencegahan saat adanya cuaca ekstrem untuk dibuatkan program pengairan dan saprodi.

Pemerintah dan Polri melakukan pengawasan terkait kelancaran pendistribusian minyak goreng dari pihak konsumen, distributor (D1, D2 dan D3), retail modern, dan pasar tradisional antisipasi adanya pedagang yang menjual dengan metode bundling. Seiring dengan kenaikan HET perlu diperhatikan terkait pemerataan dan ketersediaan stok minyak di tiap provinsi.

Pemerintah perlu memberikan mitigasi dan antisipasi saat terjadi gagal panen seperti pemberian rekomendasi BBM solar bersubsidi untuk operasional pompa air tanah. Sehingga, biaya lebih mudah dan terjangkau untuk para petani, serta memonitoring penyaluran pemberian bantuan pompa air, distribusi pupuk dan bibit padi dari Kementan.

Dilanjutkan pemaparan oleh Plt Sekjen Kemendagri yang menyampaikan bahwa berdasarkan surat Mendagri Nomor 500.2.5/1732/13 tanggal 17 Agustus 2024 tentang Atensi atas Pemenuhan Kebutuhan Champion Cabai. Kemendagri mendorong pemerintah daerah produsen cabai untuk memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap kebutuhan para Champion Cabai dalam rangka peningkatan produksi dan menjaga ketersediaan pasokan cabai di Indonesia.

Pati Sahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Panglima TNI Brigjen TNI Eko Nursanto menyampaikan berbagai upaya yang terus dilakukan oleh TNI untuk menguatkan ketahanan pangan nasional dimulai dari sisi suplai terkait dengan peningkatan produksi, upaya diversifikasi pangan, efisiensi distribusi pangan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan, hingga penguatan stok pangan nasional.

Sumber berita:

1. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pj-wali-kota-pekanbaru-ikuti-rakor-pengendalian-inflasi-pekan-keempat-agustus>, “Pj Wali Kota Pekanbaru Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Pekan Keempat Agustus”, 28 Agustus 2024; dan
2. <https://www.halloriau.com/read-ekonomi-1456634-2024-08-28-pedagang-pasar-belum-tahu-het-minyakita-telah-berubah.html>, “Pedagang Pasar Belum Tahu HET Minyakita Telah Berubah”, 28 Agustus 2024.

Catatan:

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024, Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi Indeks Harga Konsumen (*headline inflation*) yang selanjutnya disebut Inflasi IHK adalah kenaikan IHK dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Jenis Sasaran Inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan Inflasi IHK tahunan (*year-on-year*) di akhir tahun, untuk bentuk sasaran inflasi yang ditetapkan merupakan titik dengan toleransi (*point with deviation*) dengan tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut:

- a. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2022;
- b. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2023; dan
- c. 2,5% (dua koma lima persen) untuk tahun 2024, dengan deviasi sebesar 1,0% (satu persen).

IHK adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Berdasarkan *the Classification of Individual Consumption by Purpose* (COICOP) 2018, IHK dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, yaitu

1. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau;
2. Kelompok pakaian dan alas kaki;
3. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga;
4. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga;
5. Kelompok kesehatan;
6. Kelompok transportasi;
7. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan;
8. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya;
9. Kelompok pendidikan;
10. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau